

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia yang memiliki berbagai jenis flora dan fauna dengan nilai ekologis, ilmiah, serta sosial ekonomi. Namun, keberadaan satwa liar saat ini menghadapi ancaman serius, seperti perburuan liar, perdagangan satwa ilegal, dan kerusakan habitat akibat aktivitas manusia. Salah satu satwa yang dilindungi di Indonesia adalah *Capricornis sumatraensis* (kambing hutan Sumatera), yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan pegunungan. Meski demikian, keberadaannya semakin terancam akibat perburuan dan gangguan terhadap habitat alaminya, sehingga diperlukan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi satwa tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan *Capricornis sumatraensis* dalam sistem hukum Indonesia, menilai efektivitas penegakan hukum terhadap perlindungan satwa tersebut di Kabupaten Karo, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta masyarakat sekitar kawasan hutan, dan dilengkapi dengan studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan satwa dilindungi di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap perlindungan *Capricornis sumatraensis* di Kabupaten Karo belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya aparat, luasnya wilayah pengawasan hutan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta masih adanya praktik perburuan dan perdagangan satwa secara ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung perlindungan satwa dilindungi dan pelestarian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Kata Kunci: efektivitas penegakan hukum, satwa dilindungi, *Capricornis sumatraensis*, konservasi, Kabupaten Karo.